

WARTA

ADHYAKSA

Desa Bowong Cindea Jadi Penyusunan Model Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria

HermanDjide - PANGKEP.WARTAADHYAKSA.COM

Oct 11, 2024 - 19:07



Desa Bowong Cindea Jadi Penyusunan Model Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria

PANGKEP - Desa Bowong Cindea jadi tuan Rumah Rapat penyusunan model kegiatan penanganan akses reforma agraria kantor Pertanahan Kabupaten Pangkajene dan kepulauan Tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Aula

Baruga Sayang kantor desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro pada Jumat, 11 Oktober 2024.

Jajaran kantor pertanahan yang datang dengan mengusung tagline "Melayani profesional terpercaya," dipimpin Kasi Penataan Muksin Alihadu S.SiT bersama sejumlah personil staf jajarannya menghadirkan Kadis pertanian Andi Sadda, SP, Kabid penyelenggaraan perizinan dan non perizinan Dinas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Hamzah, SE mewakili Kadis, Kabid Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Muhammad Asyad, SE, MM mewakili Kadis.

Ikut hadir pula Kepala Desa Bowong Cindea H. Maruseng beserta jajaran para pengemuka masyarakat terkait.

Muksin Alihadu menyampaikan dari pada kegiatan ini sesuai dengan rohnya, kalau reforma Agraria itu terbagi atas penataan aset dan penataan akses, untuk penataan asetnya di bawah ini sudah kami kemarin ada program yang sertifikat redistribusi jumlahnya 280, kami lanjutkan dengan penataan aksesnya, jadi jika kami itu ada untuk 100 KK, ujung endingnya ini nanti di tahun ketiganya itu merupakan akses pemasaran dan permodalan,

"Jadi kegiatan ini nanti terbagi atas tiga tahap atau fase, fase satu ini untuk permintaan sosial datanya dulu kami kumpul, untuk tahun keduanya itu pembentukan kelompok dan kalau ketiga itu pendampingan untuk mendapatkan akses permodalannya, ujung-ujungnya tentu saja kesejahteraan petani yang menerima aset kami itu berupa sertifikat," lanjutnya.

Dikatakan Muksin sebenarnya kegiatan ini boleh juga didahului oleh sertifikat dulu baru pemberdayaannya atau kita balik pemberdayaan dulu setelah masyarakat sudah berhasil di pemberdayaannya kami sertifikat dan tandanya.

"Ini tahun pertama nanti di tahun kedua tahun depan 2025 kita lanjutkan di fase keduanya yaitu untuk pembentukan kelompok, jadi kemarin yang hari tahun ini kita ambil data sosialnya 100 KK itu kita akan membuat kelompok tani untuk tahun depan, nanti lanjut di tahun 2026 itu baru masuk kita untuk akses permodalannya kita hubungkan dia dengan perbankan dengan pemasarannya seperti apa, sehingga masyarakat tidak merasa sendiri, terus didampingi sampai dengan hasil pertanian atau usaha kecil ini mereka itu berhasil dipasarkan kami tidak akan lepas," jelasnya.

Menurut Muksin, pengadaan seharusnya memang di Bowong Cindea ini kita tidak 100 tetapi memang dipahami kita itu cuma dianggarkan untuk 100 KK, harapannya nanti memang kalau keuangan negara itu memungkinkan seharusnya masuk di semua desa, cuma sekarang karena keterbatasan anggaran untuk untuk 100 KK dulu, nanti kita lihat tahun depan siapa tahu ada lagi, untuk tahun pertama kita bisa balik lagi yang 100 yang masih tersisa.

"Ketiga dinas terkait kolaborasi dalam hal ini PTSP tentang izin, koperasi itu untuk mereka pembina para UMKM, kalau dinas pertanian yang jelas karena hasil pertanian yang akan kami angkat," tambahnya.

Sementara Andi Sadda Menyambungkan bahwa apa yang kita laksanakan pada hari ini cukup sinkron dengan produk apa yang hadir di tempat ini, ini semua bisa terintegrasi kegiatan-kegiatan ini dan bagaimana perekonomian kita bisa meningkat dan masyarakat bisa mempunyai pegangan terhadap tempat yang dia miliki, kedepannya apa yang bisa sinkron apa yang bisa kita kerja samakan.

Sedangkan Hamzah menekankan, intinya kegiatan ini adalah pengikut kegiatan lanjutan dari pada pertanahan Nasional

Dari PTSP bisa menjadi pendampingan dalam penerbitan label produk usaha.

Demikian juga Muhammad Asyad berujar dengan kegiatan ini usaha produk masyarakat ini sudah bisa lanjut, saat ini kami terus melakukan pembinaan usaha.(Hamsah Sampo)